

Judul : Penyerapan Anggaran Minim, Presiden Diminta Bertanggung Jawab
Tanggal : Kamis, 20 Juni 2013
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : B2

Penyerapan Anggaran Minim, Presiden Diminta Bertanggung Jawab

JAKARTA— Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis mempertanyakan masalah penyerapan anggaran yang berulang saban tahun. “Janji tinggal janji, tidak ada realisasinya. Ini tanggung jawab Presiden,” ujarnya di sela-sela uji kelayakan dan kepatutan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kompleks Parlemen, kemarin.

Menurut Harry, Presiden harus memerintahkan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) guna

merumuskan sanksi atas rendahnya penyerapan anggaran. Selama ini, sanksi hanya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan berupa pemotongan anggaran kementerian dan lembaga yang penyerapan anggarannya rendah.

Padaahal, kata Harry, Presiden bisa menjatuhkan sanksi di antara tahun berjalan. Sanksi didelegasikan ke inspektorat jenderal masing-masing kementerian atau internal audit lembaga.

Untuk mendorong penyerapan anggaran, menurut dia, perlu ada penyederhanaan proses lelang yang selama ini

bisa memakan waktu hingga tiga bulan. Jangka waktu untuk menggugat hasil lelang juga perlu dibatasi, misalnya sampai dua minggu dan tidak berlarut-larut hingga tahun anggaran habis.

Sebelumnya, pemerintah melaporkan penyerapan anggaran belanja negara dari Januari hingga 7 Juni 2013 sebesar 32,2 persen atau Rp 541,98 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding belanja negara pada periode serupa tahun lalu sebesar 34,1 persen.

Dari total belanja yang terserap tersebut, mayoritas belanja digunakan untuk

belanja pegawai sebesar 40,2 persen, disusul 17,4 persen untuk belanja barang, serta 14,4 persen untuk belanja modal.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan rendahnya penyerapan anggaran kementerian dan lembaga ini akan mengganggu target pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal pemerintah berharap *government expenditure* bisa menjaga pertumbuhan sebesar 6,3 persen. “Realisasi serapan anggaran kementerian dan lembaga akan digenjot hingga 95-98 persen,” ujarnya. ● MARTHA THERTINA |

LINDA TRIANTA | MUHAMMAD MUHYIDDIN